

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Kemiskinan

a. Teori Kemiskinan

1) Teori Neo-Klasik

Teori Neo-Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Terus berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Aliran Neoklasik ini disebut juga dengan “teori hubungan manusiawi”. Teori ini muncul akibat ketidakpastian dengan teori klasik dan juga penyempurnaan teori klasik. Munculnya teori Neoklasik diawali dengan adanya inspirasi percobaan yang dilakukan di pabrik Hawthorne tahun 1924 milik perusahaan.¹

Teori pertumbuhan neo klasik melihat dari perspektif yang berbeda, yaitu dari segi penawaran. Menurut teori neo klasik membagi tiga jenis input yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu pengaruh modal dalam pertumbuhan ekonomi, pengaruh teknologi dalam pertumbuhan ekonomi, dan pengaruh angkatan kerja yang bekerja dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam persamaan, pandangan ini dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$Y = f(K, L, T)$$

Dimana :

Y adalah tingkat pertumbuhan ekonomi

K adalah tingkat pertumbuhan modal

L adalah tingkat pertumbuhan penduduk

t adalah tingkat pertumbuhan teknologi

Teori ini dikatakan bahwa rasio capital output atau rasio modal produksi dapat dengan mudah berubah. Dengan kata lain, untuk menghasilkan sejumlah output tertentu, kombinasi antara pemakai modal dan tenaga kerja. Semakin besar modal yang digunakan, semakin sedikit tenaga kerja yang dibutuhkan. Sebaliknya, jika

¹ Lestari Usgia Serly, “Analisis Teori - Teori Pertumbuhan Ekonomi Sebuah Studi Literatur,” 2018.

modal yang digunakan lebih terbatas, maka tenaga kerja yang digunakan lebih banyak. Ekonomi neoklasik berpendapat pasar harus bebas dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi. Pemerintah seharusnya tidak mengintervensi karena itu hanya akan membuat pasar tidak efisien. Tanpa aturan dari pemerintah, individu atau bisnis bebas untuk menciptakan hasil ekonomi yang terbaik bagi mereka. Kebebasan seperti itu akan menghasilkan pasokan lebih banyak dan lebih bervariasi, meningkatkan PDB, upah dan standar hidup.²

2) Teori David Ricardo

David Ricardo menjelaskan pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh pertumbuhan penduduk, dimana pertumbuhan penduduk yang terlalu besar hingga dua kali lipat dapat menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima menurun, yang mana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum (*subsistence level*). Pada taraf ini, perekonomian mengalami stagnasi (pemberhentian) yang biasa disebut *Stationary State*. Dengan adanya keadaan tersebut, akan membuat pertumbuhan perekonomian di suatu daerah akan menurun sehingga dapat menyebabkan meningkatnya kemiskinan.³

b. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan dapat dipahami sebagai ketidakmampuan individu, kelompok dan keluarga untuk mencapai standar hidup minimum. Misalnya, dengan tingkat pendidikan yang rendah, banyak orang yang menganggur dan kehilangan pekerjaan, serta banyak penduduk yang tidak dapat mengakses program atau layanan pemerintah, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhannya.⁴ Kemiskinan bersifat multidimensional dan melibatkan semua aspek kebutuhan

² Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykpn, 1992), Hlm 52.

³ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

⁴ Bambang Rustanto, *Mengenai Kemiskinan* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2015).

manusia yang berbeda-beda. Selain itu, berbagai aspek kebutuhan manusia juga saling terkait.⁵

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang telah ada selama bertahun-tahun. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dengan banyak sisi dan sepertinya akan terus menjadi masalah nyata dari waktu ke waktu. Meskipun sejauh ini belum ditemukan suatu rumusan ataupun formula penanganan. Jika kemiskinan dianggap paling efektif, signifikan dan relevan, penelitian tentang konsep dan strategi penanggulangan kemiskinan harus dilanjutkan. Upaya-upaya tersebut tentunya sangat berarti agar kemiskinan tidak lagi menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat.⁶

Proper atau kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Chambers (dalam Chriswardani Suryawati, 2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu:

- 1) *Proper* (Kemiskinan)
- 2) *Powerless* (Ketidakberdayaan)
- 3) *State of emergency* (kerentanan menghadapi situasi darurat)
- 4) *Dependence* (Ketergantungan)
- 5) *Isolation* (Keterasingan) baik secara geografis maupun sosiologis.⁷

c. **Jenis-jenis Kemiskinan**

Kemiskinan bukan hanya hidup kekurangan uang dan berpenghasilan rendah, tetapi juga banyak hal lainnya, seperti: Kesehatan yang buruk, pendidikan yang buruk, perlakuan hukum yang tidak adil, kerentanan terhadap ancaman kriminal, ketidakberdayaan dalam menghadapi kekuasaan dan impotensi tentukan jalan hidupnya sendiri. Kemiskinan dapat dibagi menjadi empat bentuk, yaitu:

⁵ Irawan Dan M. Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan Edisi Keenam* (Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta, 1996).

⁶ N. Gregori Mankiw, *Teori Makro Ekonomi* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2003).

⁷ Chriswardani Suryawati, "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional" Vol. 08 No.3 (September 2005).

- 1) Kemiskinan absolut. Pendapatan berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, perawatan kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk dapat hidup dan bekerja.
- 2) Kemiskinan relatif. Kondisi yang memprihatinkan akibat pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan.⁸
- 3) Kemiskinan kultural. Mengacu pada masalah sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti keengganan untuk berusaha meningkatkan taraf hidup, kemalasan, pemborosan, tidak kreatif bahkan dengan bantuan dari pihak luar.
- 4) Kemiskinan struktural. Keadaan kemiskinan akibat rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam sistem sosial politik dan sosial budaya yang tidak mendukung pengentasan kemiskinan tetapi biasanya menyebabkan substansi kemiskinan.⁹

d. Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Kata “miskin” yang berarti “diam” atau tidak bergerak. Orang mendapat kesan bahwa unsur utama kemiskinan adalah diam, keengganan atau ketidakmampuan untuk bergerak dan mencoba. Keengganan untuk bekerja adalah merugikan diri sendiri, sedangkan ketidakmampuan untuk bekerja adalah karena perlakuan buruk terhadap orang lain. Ketidakmampuan untuk bekerja yang disebabkan oleh orang lain juga dikenal sebagai kemiskinan struktural. Menurut Islam, golongan orang yang memiliki harta (uang) tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sebagai orang fakir. Sementara itu, orang miskin orang yang tidak memiliki harta (uang) dan tidak memiliki penghasilan.¹⁰ Efek ini semakin nyata ketika diamati bahwa jaminan rezeki yang dijanjikan oleh Allah SWT. ditujukan pada

⁸ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: Stim Ykpn, 2004), Hlm 238.

⁹ Suryawati, “Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional.”

¹⁰ Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidzamul Iqtishadi Fil Islam* (Beirut: Darul Ummah, 1990), Hlm 236.

mahluk yang disebut dabbah, yang secara harfiah berarti bergerak. Firman dalam Alquran.

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ
وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Artinya: “Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.¹¹

Selain definisi terminologis tersebut, para pakar agama juga berbeda pendapat dalam menetapkan tolok ukur kemiskinan dan ke fakiran. Faktanya, tidak ada informasi dari Al-Quran atau hadis untuk menentukan angka tertentu atau ditetapkan sebagai ukuran tingkat kemiskinan. Al-Quran hanya menekankan perintah menyantuni orang miskin, melarang menganiaya mereka, melarang meminggirkan dan mendiskreditkan mereka, melarang mengumpulkan kekayaan, dan lain-lain.¹²

e. **Indikator Kemiskinan**

Indikator kemiskinan akan mempermudah kalangan dalam menganalisa model-model penanggulangan kemiskinan, baik berupa langkah preventif maupun langkah perbaikan. Kemiskinan perlu di petakan berdasarkan kriteria dan kajian mendalam Menurut Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yaitu kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan seperti sandang, pendidikan, perumahan, dan kesehatan yang di lihat dari sisi pengeluaran.¹³ Begitu pun dengan *World Bank* dikatakan miskin apabila pendapatan perkapitanya di bawah rata-rata, yaitu sepertiga pendapatan skala nasional. Secara umum Bank Dunia menetapkan sebesar US\$ 1

¹¹ Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Pt Sinergi Pustaka Indonesia), Surat Al-Kahfi Ayat 79.

¹² M. Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi Al-Qur'an; Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* (Yogyakarta: Kaukaba, 2012, Hlm 159).

¹³ Idr. Irfan Syauqi Beik Dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm 6.

untuk negara berkembang dan sebesar US\$ 2 negara maju perhari.¹⁴

Pemerintah melalui BPS (Badan Pusat Statistik) memiliki 14 Kriteria Kemiskinan yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai seseorang itu miskin atau tidak. Dari 14 kriteria kemiskinan ini, dapat dikatakan miskin dan layak menerima bansos apabila terpenuhi minimal 9 kriteria.

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
- 8) Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.

¹⁴ Muhammad Sukarni, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), Hlm 127.

- 14) Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.¹⁵

2. Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang lambat atau penurunan ekonomi menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang sangat merugikan masyarakat. Pengangguran yang meningkat, kemakmuran yang menurun, dan keresahan sosial adalah beberapa konsekuensi penting yang akan dihadapi.¹⁶ Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi penting untuk mengentaskan masyarakat keluar dari kemiskinan, bahkan jika pertumbuhan ekonomi saja tidak dapat mengurangi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi tetap menjadi faktor kunci pengentasan kemiskinan. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi diukur dengan peningkatan pendapatan daerah selama periode tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan riil daerah pada tahun tertentu terhadap pendapatan riil daerah pada tahun sebelumnya.¹⁷

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan pembangunan. Suatu negara dapat dikatakan tumbuh apabila kegiatan perekonomian masyarakat secara langsung mempengaruhi peningkatan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan seberapa besar kegiatan ekonomi menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat pada periode tertentu. Indikator pertumbuhan ekonomi yang digunakan untuk mengukur adalah laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Memilih pertumbuhan ekonomi dengan Produk Domestik

¹⁵ Badan Pusat Statistik, “Bps (Badan Pusat Statistik), Kemiskinan Dan Ketimpangan,” 2023, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekviewtab1>.

¹⁶ Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi* (Yogyakarta: Bpfe Ugm, 1992) Hlm. 270.

¹⁷ Mulianta Ginting Dan Rasbin, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Krisis.”

Bruto (PDB) dibandingkan indikator lainnya adalah besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan produksi dalam perekonomian, artinya pertumbuhan PDB juga mencerminkan peningkatan balas jasa faktor-faktor produksi tersebut.¹⁸

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan total nilai tambah bruto dari semua sektor ekonomi daerah sering digunakan untuk menentukan besaran pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, produk domestik bruto per kapita adalah pendapatan per kapita, yaitu pendapatan total suatu daerah atau wilayah dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. Permasalahannya adalah meningkatnya ketimpangan ekonomi antar warga masyarakat, yang tidak dapat sepenuhnya ditunjukkan oleh indeks rasio gini saja. Untuk mengatasi hal ini diperlukan pemantauan yang lebih dekat di lapangan, dan kebijakan yang bersifat positif berpihak pada kaum miskin, terutama kaum miskin pedesaan.¹⁹ Berikut ini adalah rumus sebagai cara mengukur pertumbuhan ekonomi

$$PE = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{(PDRB_{t-1})} \times 100\%$$

Keterangan:

PE = Pertumbuhan Ekonomi

PDRB_t = Produk Domestik Regional Bruto tahun t

PDRB_{t-1} = Produk Domestik Regional Bruto periode sebelumnya

b. **Pertumbuhan Ekonomi dalam Prespektif Islam**

Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan terus-menerus dari faktor-faktor produksi yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia.²⁰ Oleh karena itu, menurut Islam, pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang syarat nilai. Pertumbuhan faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan

¹⁸ N. Gregori Mankiw, *Teori Makro Ekonomi* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2003). Hlm. 65.

¹⁹ Tarigan Robinson, *Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta: Salemba, 2012). Hlm. 74.

²⁰ Abul Hasan Muhammad Sadeq, *Economic Development In Islam* (Malaysia: Pelanduk Publication, 1991).Hlm.5-6.

ekonomi jika, misalnya, produksi tersebut mencakup barang-barang yang telah terbukti memiliki efek merugikan dan membahayakan manusia. Dengan demikian, pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara integral. Dalam kajian ekonomi Islam, isu pertumbuhan ekonomi mendapat perhatian para ahli wacana pemikiran ekonomi islam klasik. Pembahasan ini diantaranya berangkat dari firman Allah Swt.

وَأَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ طِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Artinya: “Dia yang telah menjadikan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).” (Qs. Hud 61)²¹

Allah Swt. menjadikan kita sebagai wakil untuk memakmurkan bumi. Terminologi ‘pemakmuran bumi’ ini mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir: “Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran bumi dengan perhatian yang lebih besar dari pada orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran bumi. Barang siapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran bumi, negara tersebut akan hancur.”²²

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: Pt Sinergi Pustaka Indonesia, T.T.). Surat Hud Ayat 61.

²² Al-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar Dan Tujuan*, T.T. Hlm282-283.

3. Upah Minimum

a. Pengertian Upah Minimum

Upah adalah balas jasa pengusaha kepada karyawan untuk pekerjaan atau jasa yang akan atau telah dilakukan, dinilai dengan bentuk uang atas persetujuan atau undang-undang yang telah ditetapkan. Upah yang dibayarkan juga termasuk tunjangan untuk dirinya dan keluarganya.²³ Kesejahteraan pekerja/buruh adalah terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani baik kebutuhan di dalam dan di luar hubungan kerja yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Upah dapat berdasarkan kontrak kerja, selama ketentuan upah berlaku dalam kontrak kerja yang bertentangan dengan hukum. Jika ternyata ketentuan upah dalam kontrak kerja bertentangan maka yang berlaku adalah ketentuan upah didalam peraturan perundang-undangan.²⁴

b. Komponen upah

Komponen upah meliputi upah pokok dan tunjangan tetap. Pengelompokan komponen pendapatan upah dan pendapatan non upah disebutkan sebagai berikut:

a) Termasuk Komponen Upah adalah

- 1) Upah pokok adalah upah yang dibayarkan untuk pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan
- 2) Tunjangan tetap, yaitu pembayaran rutin terkait dengan pekerjaan tetap yang telah ditugaskan kepada pekerja atau buruh dan keluarganya dan dibayar dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok seperti tunjangan istri, tunjangan anaka, tunjangan jabatan dan lain-lain. Tunjangan tetap dibayar secara teratur dan tidak terkait dengan kehadiran pekerja atau mencapai suatu prestasi.

²³ Sony Sumarsono, *Teori Dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009). Hlm. 181.

²⁴ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

- 3) Tunjangan tidak tetap, yaitu upah langsung atau tidak langsung berhubungan dengan pekerja dan dibayarkan kepada pekerja dan keluarganya secara tidak tetap dan tidak dibayarkan bersamaan dengan upah pokok.
- b) Tidak Termasuk Komponen Upah
 - 1) Tunjangan hari raya (THR), gratifikasi dan pembagian keuntungan lainnya.
 - 2) Insentif merupakan bentuk kompensasi dari perusahaan kepada tenaga kerja sebagai tambahan penghasilan di luar gaji ataupun upah bulanan sebagai penghargaan atas kerja kerasnya dalam bekerja.
 - 3) Bonus, yaitu pembayaran yang diterima pekerja dari keuntungan atau karena pekerja menghasilkan lebih banyak pekerjaan dari target produksi normal atau karena peningkatan produktivitas, jumlah pembagian bonus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - 4) Fasilitas, yaitu keuntungan dalam bentuk natura yang diberikan oleh perusahaan dengan alasan khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja atau karyawan seperti fasilitas kendaraan, makan gratis, tempat ibadah, penitipan bayi, koperasi, kantin, dan lain-lain.
 - 5) Uang servis pada usaha tertentu wajib dibagikan kepada pekerja atau buruh setelah dikurangi biaya cadangan terhadap resiko kehilangan atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatan sumber daya manusia.

Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja/buruh. Kebijakan pengupahan tersebut meliputi :

- 1) Upah minimum
- 2) Struktur dan skala upah
- 3) Upah kerja lembur
- 4) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan dan/atau tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya

- 5) Bentuk dan cara pembayaran upah
- 6) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
- 7) Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.²⁵

Upah minimum adalah tingkat minimum yang digunakan pengusaha atau pelaku industri membayar upah bagi karyawan di perusahaan atau lingkungan kerja. Dasar dan kewenangan untuk menetapkan upah minimum sebagaimana diuraikan dalam peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 18 tahun 2022 tentang upah minimum adalah penetapan upah minimum didasarkan pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.²⁶ Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku untuk orang yang belum menikah dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, ditetapkan sebagai jaring pengaman, ditetapkan dengan keputusan gubernur berdasarkan rekomendasi badan pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan.²⁷

c) **Jenis-jenis Upah minimum**

Adapun jenis-jenis upah sebagai berikut:

- 1) Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi, yang wajib ditetapkan oleh Gubernur setiap tahunnya.

²⁵ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan,” T.T., https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/pp362021.pdf.

²⁶ Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.”

²⁷ Indra Riko Rosandi, Muh Jamal Amin, Dan Letizia Dyastari, “Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan(Studi Kasus Penerapan Upah Minimum Di Kota Samarinda)” 5 (2017).

- 2) Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.²⁸

c. Kebijakan Penetapan Upah Minimum

Upah minimum ditetapkan oleh gubernur setelah melalui rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota. Pengusaha tidak boleh membayar upah pekerja atau buruh di bawah upah minimum daerah tempat pekerja/buruh bekerja, termasuk pekerja atau buruh yang menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) bulan pertama.²⁹

Daerah yang telah memiliki Upah Minimum, penetapan Upah Minimum dilakukan dengan penyesuaian nilai Upah Minimum. Penyesuaian nilai Upah Minimum tahun 2023 dihitung menggunakan formula penghitungan Upah Minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Data yang digunakan untuk penghitungan Upah Minimum bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Formula penghitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

$$UM(t+1) = UM(t) + (\text{Penyesuaian Nilai } UM \times UM(t))$$

Keterangan:

UM (t+1): Upah Minimum yang akan ditetapkan.

UM (t): Upah Minimum tahun berjalan.

Penyesuaian Nilai UM : Penyesuaian nilai Upah Minimum yang merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan α .

Penetapan atas penyesuaian nilai Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen). Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 10% (sepuluh persen), Gubernur menetapkan Upah Minimum

²⁸ Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia."

²⁹ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007). Hlm. 51.

dengan penyesuaian paling tinggi 10% (sepuluh persen). Jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, penyesuaian nilai Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) hanya mempertimbangkan variabel inflasi.³⁰

Hasil penghitungan penyesuaian nilai Upah Minimum, Gubernur menetapkan Upah Minimum Kabupaten Pati tahun 2022 sebesar Rp 1.968.339,04.³¹

d. Upah Dalam Prespektif Ekonomi Islam

Menurut Islam, upah termasuk dalam kajian fiqh muamalah yaitu ijarah. Menurut Sayyid Sabiq *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah).³²

Secara etimologi, ijarah adalah upah yang diberikan kepada seseorang sebagai ganti pekerjaannya. Secara terminologis, pengarang Mughni Al-Muhtaj yang bermazhab Syafi'iah mendefinisikan ijarah sebagai transaksi atas manfaat dari sesuatu yang diketahui, dapat diserahkan dan diizinkan, dengan imbalan yang diketahui. Sementara bahwa, Al-Qaduri dari Mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai berdagang untuk berbagai manfaat (sesuatu) dengan memberi imbalan.

Adapun menurut Jumbuh Ulama ada empat rukun yang harus terpenuhi di dalamnya, antara lain:

- 1) Dua orang yang berakad.
- 2) Shighat (ijab dan qabul).
- 3) Sewa atau imbalan.
- 4) Manfaat.³³

Adapun syarat-syarat al-ijarah sebagaimana yang ditulis oleh Nasrun Haroen sebagai berikut:

³⁰ Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.”

³¹ Badan Pusat Statistik, “Upah Minimum Kabupaten Kota Di Provinsi Jawa Tengah,” Diakses 25 Juni 2023, <https://jateng.bps.go.id/indicator/6/708/1/upah-minimum-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>.

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terj. Kamaluddin A. Marzuki* (Bandung: Alma'arif, 1988). Hlm. 15.

³³ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalani Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam* (Jakarta: Hikmah, 2010), Hlm 145.

- 1) Yang terkait dengan dua orang yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratkan telah balig dan berakal
- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijarah*.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari
- 4) Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung.
- 5) Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'.
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat.
- 7) Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan.
- 8) Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.³⁴

4. Pengangguran Terbuka

a. Pengertian Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau menyiapkan bisnis baru atau penduduk tidak melihat bekerja karena sudah diterima tetapi belum mulai bekerja.³⁵ Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi orang secara langsung dan yang paling serius. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti standar hidup yang lebih rendah dan konsekuensi psikologis. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pengangguran menjadi topik hangat perdebatan politik dan politisi sering mengklaim bahwa

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010).Hlm.277.

³⁵ Badan Pusat Statistik, "Pengangguran," T.T., [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1177/sdgs_11/1#:~:Text=Pengangguran%20yaitu%3a%20\(1\)%20penduduk,Alasan%20sudah%20mempunyai%20pekerjaan%20tetap.](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1177/sdgs_11/1#:~:Text=Pengangguran%20yaitu%3a%20(1)%20penduduk,Alasan%20sudah%20mempunyai%20pekerjaan%20tetap.)

kebijakan yang mereka usulkan akan membantu menciptakan lapangan kerja.³⁶

Secara umum, pengangguran didefinisikan bahwa ketidakmampuan tenaga kerja untuk menemukan pekerjaan yang cocok untuk mereka butuhkan dan mereka inginkan. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengangguran merujuk pada situasi dimana seseorang harus dihadapkan dengan keadaan ketiadaan kesempatan kerja. Peningkatan tingkat pengangguran di suatu daerah dapat dikaitkan dengan peningkatan jumlah penduduk. Karena penduduk juga berfungsi sebagai angkatan kerja, maka ketika jumlah penduduk besar dan tidak dapat menyediakan banyak lapangan pekerjaan maka akan menimbulkan pengangguran yang lebih banyak.³⁷

b. Jenis-jenis Pengangguran

Pengangguran tidak selalu berarti bahwa orang menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Orang yang sudah bekerja dan melakukan pekerjaannya juga dapat dikatakan menganggur karena konsep pengangguran dapat dipahami dalam tiga aspek, yaitu: waktu, identitas pekerjaan dan produktivitas.

Berikut beberapa jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya, yaitu:

1) Pengangguran Normal atau Friksional

Jika dalam perekonomian ada tingkat pengangguran dua sampai empat persen populasi angkatan kerja, maka ekonomi berada pada kesempatan kerja penuh (*full employment*). Tingkat pengangguran dua sampai empat persen dipandang pengangguran biasa atau friksional.

2) Pengangguran struktural

Pengangguran struktural (*structural unemployment*) disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Tidak semua industri dan bisnis dalam perekonomian suatu negara akan terus tumbuh, beberapa bisnis dan industri akan

³⁶ Mankiw N Gregory, *Pengantar Ekonomi Makro, Edisi Ketiga* (Jakarta: Salemba Empat, 2006).Hlm. 150

³⁷ Nanga Muana, *Makroekonomi Teori, Masalah Dan Kebijakan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).Hlm 253.

mengalami penurunan. Krisis ini akan menyebabkan produksi industri merosot, sehingga sebagian pekerja terpaksa diputus kontrak kerjanya dan akibatnya mereka menganggur.

3) Pengangguran siklikal

Pengangguran ini disebabkan oleh harga bahan baku industri menurun, yang menyebabkan penurunan produksi barang. Tingkat harga ini terkait dengan penurunan permintaan luar negeri, sehingga produksi bisnis turun, yang berarti bisnis harus berhemat yang berarti perusahaan harus mengurangi pekerja sehingga menjadikan pengangguran.³⁸

4) Pengangguran teknologi

Pengangguran teknologi ini disebabkan oleh perubahan teknologi, dari yang sederhana menjadi modern. Tenaga manusia telah tergantikan oleh tenaga mesin, sehingga tenaga kerja tersingkir dari kegiatan usaha.³⁹

Dilihat berdasarkan ciri-cirinya, pengangguran dibagi menjadi empat, sebagai berikut :

1) Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran ini tercipta karena pertambahan lapangan kerja lebih kecil daripada pertambahan angkatan kerja. Akibatnya, semakin banyak pekerja dalam perekonomian yang tidak dapat menemukan pekerjaan. Konsekuensi dari situasi ini adalah untuk jangka waktu yang cukup lama, mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Oleh karena itu, mereka adalah pengangguran nyata dan paruh waktu, dan oleh karena itu disebut pengangguran terbuka.

2) Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran tersembunyi adalah angkatan kerja yang karena suatu hal tidak bekerja secara

³⁸ Prathama Rahardja, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikroekonomi Dan Makroekonomi Edisi Ketiga* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006).Hlm. 380

³⁹ Arrie Benggolo, *Tenaga Kerja Dan Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Jasa Karya, 2000). Hlm. 19-20

optimal. Salah satunya adalah perusahaannya kecil dan memiliki terlalu banyak karyawan, sehingga operasinya tidak efisien. Kelebihan input tenaga kerja diklasifikasikan sebagai pengangguran tersembunyi.

3) Pengangguran musiman

Pengangguran ini berkaitan erat dengan fluktuasi jangka pendek dalam kegiatan ekonomi, khususnya di sektor pertanian. Misalnya di luar musim tanam dan panen petani biasanya menganggur sampai menunggu musim tanam dan panen berikutnya.

4) setengah menganggur

Angkatan kerja, yang termasuk setengah pengangguran, adalah sekelompok pekerja yang waktu kerjanya (dalam hari, jam atau minggu) kurang dari yang seharusnya mereka bisa kerjakan.⁴⁰

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan diri untuk membuka usaha, tidak sedang mencari pekerjaan karena menganggap tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari jumlah tenaga kerja tersedia. Pengangguran terbuka juga dapat diakibatkan oleh penurunan kegiatan ekonomi, kemajuan teknologi yang mengurangi lapangan kerja, atau penurunan perkembangan suatu industri. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menunjukkan bahwa penduduk telah memasuki usia kerja tetapi belum menemukan pekerjaan. Tingkat pengangguran diukur sebagai persentase dari jumlah orang yang menganggur terhadap angkatan kerja yang tersedia. Untuk menghitung tingkat pengangguran terbuka menggunakan rumus sebagai berikut:⁴¹

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$$

⁴⁰ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006).

⁴¹ Suparmono, *Pengantar Ekonomimakro Teori, Soal Dan Penyelesaiannya* (Yogyakarta: Amp Y Kpn, 2004).

c. Penyebab Terjadinya Pengangguran

Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran, antara lain:

- 1) Jumlah pekerja dan jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang, Pada dasarnya pengangguran terjadi karena keadaan di mana permintaan tenaga kerja jauh lebih rendah daripada penawaran tenaga kerja itu sendiri.
- 2) Kemajuan teknologi, Teknologi yang berkembang pesat sangat bermanfaat bagi perkembangan kehidupan manusia. Perkembangan teknologi juga berdampak pada masyarakat itu sendiri, terutama bagi para pekerja yang tidak lagi membutuhkan tenaga karena tergantikan oleh mesin.
- 3) Kurangnya pendidikan dan keterampilan, Kurangnya pendidikan dan keterampilan menjadi penyebab pengangguran di Indonesia, untuk memperoleh pekerjaan, keterampilan sangat diperlukan.
- 4) Kebijakan pemerintah, Kebijakan pemerintah dapat mengembangkan atau menyusutkan perusahaan. Misalnya, kebijakan tentang kemasam rokok, menyebabkan penurunan permintaan pasar terhadap produk tersebut. Harga yang melonjak akibat pita cukai juga menjadi pemicu penurunan angkatan kerja yang kemudian menjadi pengangguran besar-besaran.
- 5) Jauhnya domisili dari kota yang memiliki banyak peluang kerja, keadaan juga menyebabkan seseorang tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan yang dibutuhkan. Jarak tempat tinggal dari kota yang menjadi pusat industri menjadi kendala untuk mendapatkan informasi tentang tawaran pekerjaan.
- 6) Tidak sesuainya upah dengan pencari kerja, Ketidakesesuaian upah yang diterima menjadi salah satu penyebab timbulnya pengangguran, hal ini

dikarenakan keterampilan yang dimiliki tidak sebanding dengan upah yang dibayarkan.⁴²

d. Pengangguran Menurut Prespektif Islam

Masalah makro Islam ketika pengangguran di suatu negara mengalami peningkatan kerusuhan politik dan sosial yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan rakyatnya dan prospek pembangunan ekonomi jangka panjang. Salah satu tanggung jawab pemerintah dalam memerangi pengangguran adalah menyediakan lapangan kerja sesuai dengan jumlah tenaga kerja. Kebijakan pemerintah sangat penting dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja.⁴³ Sudah menjadi *Sunnatullah* bahwa terjaminnya persediaan pangan hanya dapat diperoleh dengan berusaha dan bekerja sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al Mulk ayat 15:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَوَّرَدُونَ إِلَىٰ غَلِيمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (Q.S At-Taubah :105)⁴⁴

Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar umatnya tidak menganggur dan melakukan berbagai bentuk kegiatan ekonomi di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, periklanan, industri dan perdagangan. Islam memberkati pekerjaan dunia dan menjadikannya bagian dari ibadah dan jihad.

⁴² Rizki Dita Aprilia, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2008-2013),” T.T.

⁴³ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah* (Bandung: Cv.Pustaka Setia, 2016). Hlm. 58.

⁴⁴ Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Pt Sinergi Pustaka Indonesia), Surat At-Taubah Ayat 105.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian ini, gambaran penelitian, penyusunan kerangka penelitian, obyek penelitian dan yang terkait dengan penelitian sebelumnya. Berikut adalah hasil penelitian sebelumnya yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Judul dan Nama Penulis	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Rosdina Sagala, Harlen dan Bunga Chintia Utami (2023) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pelalawan”	Regresi Linier berganda	a. Pertumbuhan Ekonomi secara berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Pelalawan. b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Pelalawan. c. Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bersama-sama berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pelalawan.	Penelitian terdahulu tahun 2006-2021, penelitian saat ini tahun 2013-2022 dan objek penelitian terdahulu di Kabupaten Pelalawan.
2.	Ambok Pangiuk tahun (2018) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Kemiskinan di Provinsi Jambi	Statistik regresi sederhana	a. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2009-2013.	Perbedaannya ialah pada periode penelitian terdahulu tahun 2009-2013, penelitian saat ini tahun 2013-

No	Judul dan Nama Penulis	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Tahun 2009-2013”			2022 dan objek penelitian terdahulu di Provinsi Jambi.
3.	Novia Rahmawati, Panji Kusuma Prasetyanto dan Fitrah Sari Islami (2022) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Regional (UMR), dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2017-2021 (Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia)	Regresi data panel	<p>a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Regional, dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin.</p> <p>b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin</p> <p>c. Upah Minimum Regional (UMR), dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin.</p>	Dilihat dari variabel x menggunakan data pembangunan manusia (IPM) dan penelitian di 34 provinsi di Indonesia
4.	Reki Ardian, Yulmardi dan Adi Bhakti (2021) “Pengaruh Pertumbuhan	Regresi data panel	a. Pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia	Perbedaannya ialah pada variabel x Indeks Pembangunan Manusia (IPM),

No	Judul dan Nama Penulis	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi		berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. b. Tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi.	periode penelitian terdahulu tahun 2000-2017, penelitian saat ini tahun 2013-2022 dan objek penelitian terdahulu di Provinsi Jambi,
5.	Ria Safitri, Jadzil Baihaqi dan Supriyadi (2020) “Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Pembangunan Manusia Berbasis Maqashid Syariah terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah”	Regresi berganda	a. Upah minimum kota berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan di Kabupaten Grobogan. b. Pembangunan manusia berbasis maqashid syariah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Kabupaten Grobogan.	Perbedaannya ialah pada variabel x data Pembangunan Manusia Berbasis Maqashid Syariah. periode penelitian terdahulu tahun 2011-2017, penelitian saat ini tahun 2013-2022 dan objek penelitian terdahulu di Kabupaten Grobogan

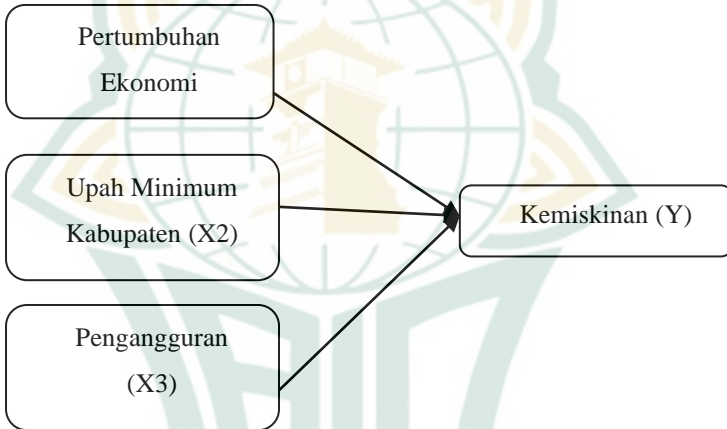
Kesimpulan dari beberapa penelitian terdahulu yang menjadi perbedaan penelitian ini adalah peneliti menggunakan 4 variabel yaitu variabel x pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten dan pengangguran serta variabel y kemiskinan kabupaten Pati periode 2013-2022.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka Berfikir digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dalam proses

perumusan masalah. Kerangka berpikir sebagai kerangka konseptual berkaitan dengan menanggapi penyebab masalah. Kerangka berpikir disusun untuk menunjukkan kebenaran dan akurasi penelitian, dan dasar penyusunan ini didasarkan pada teori yang diperoleh dari tinjauan pustaka dan perlu diperkuat dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Kerangka berpikir untuk membantu dan mendorong peneliti untuk memfokuskan upaya penelitian mereka pada pemahaman hubungan antara variabel yang dipilih.⁴⁵ Berdasarkan uraian di atas, kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Dari gambar kerangka berfikir diatas dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan pengangguran di Kabupaten Pati menjadi variabel bebas (independen), sedangkan kemiskinan menjadi variabel terikat (dependen). Peneliti menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi karena merupakan salah satu faktor pendukung penurunan kemiskinan, jika pertumbuhan ekonomi suatu bangsa stabil dan cepat, maka kemakmuran bangsa akan meningkat. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi sesungguhnya tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan, untuk itu pertumbuhan ekonomi pada umumnya diperlukan, meskipun pertumbuhan ekonomi

⁴⁵ Amos Neolaka, *Metode Penelitian Dan Statistik* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), Hlm 166-167.

yang baik tidak berarti bagi pengurangan penduduk miskin kecuali jika disertai dengan pemerataan pendapatan.

Peneliti juga menggunakan variabel upah minimum. Upah minimum juga berpengaruh secara tidak langsung terhadap salah satu faktor penentu kemiskinan, jika upah ini mencakup semua kebutuhan hidup. Tujuan utama penetapan upah minimum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi pekerja. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan terbebas dari kemiskinan.

Penggunaan variabel pengangguran karena merupakan salah satu faktor yang menurunkan kesejahteraan rakyat, jika sudah ada pekerja tetapi juga ada yang menganggur, ini sama saja dengan penurunan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini meneliti bahwa tingkat pengangguran mencerminkan kurangnya keberhasilan pembangunan negara. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dalam banyak cara.

D. Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah jawaban atas masalah penelitian yang bersifat sementara sampai bukti ditemukan melalui pengumpulan data. Disebut sementara karena jawaban dihasilkan hanya berdasarkan teori yang relevan, belum berdasarkan kenyataan empiris melalui pengumpulan data. Oleh karena itu, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan penelitian, belum jawaban yang empiris.⁴⁶ Maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran perekonomian suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan merupakan syarat atau kebutuhan terpenting bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Dalam pembangunan ekonomi daerah, tujuan pembangunan itu sendiri tidak jauh berbeda dengan tujuan pembangunan nasional. Namun, proses pembangunan daerah jauh lebih spesifik.⁴⁷

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 1999), Hlm 51.

⁴⁷ Tambunan, *Perekonomian Indonesia*.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan pembangunan dan syarat yang diperlukan untuk pengentasan kemiskinan. Ini berarti bahwa pertumbuhan harus menyebar ke seluruh golongan pendapatan, termasuk masyarakat miskin. Selain itu, harus dipastikan bahwa pertumbuhan terjadi pada sektor-sektor di mana penduduk miskin bekerja, termasuk sektor padat karya atau pertanian.⁴⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sabyan dan Rina Widyanti (2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di kota Jambi.

H₁: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pati Tahun 2013-2022

2. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten terhadap Kemiskinan

Pada dasarnya upah merupakan sumber utama pendapatan manusia, sehingga upah harus memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan wajar. Untuk melindungi pekerja, pemerintah mengatur upah minimum yang dapat dibayarkan pengusaha kepada pekerjanya.⁴⁹

Tujuan utama penetapan upah minimum adalah untuk memenuhi standar hidup minimum seperti kesehatan, efisiensi dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum merupakan upaya untuk mengangkat derajat masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya pekerja miskin. Peningkatan upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan mereka dan dengan demikian mengangkat mereka dari kemiskinan.⁵⁰

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ria Safitri, Jadzil Baihaqi, dan Supriyadi (2020). Hasil penelitian menunjukkan upah minimum kota berpengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan di Kabupaten Grobogan.

⁴⁸ Aprilia, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2008-2013)."

⁴⁹ Suparmoko, *Pengantar Ekonomika Makro* (Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta, 2009).

⁵⁰ Achmad Khabhibi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan.," 2013.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Upah Minimum Kabupaten berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pati Tahun 2013-2022

3. Pengaruh Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan

Hubungan antara pengangguran dan kemiskinan sangat erat, jika suatu masyarakat sudah bekerja pasti masyarakat atau orang tersebut berkecukupan atau kesejahterannya tinggi, tetapi ada juga pengangguran di masyarakat, dan pengangguran otomatis akan mempengaruhi tingkat kemiskinan.⁵¹

Akibat buruk dari pengangguran adalah berkurangnya pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Menurunnya kesejahteraan masyarakat akibat pengangguran pasti akan menambah kemiskinan. Jika pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi jangka panjang.⁵²

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rosdina Sagala, Harlen, Bunga Chintia Utami (2023). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pati Tahun 2013-2022

⁵¹ Sudarsana Arka, "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali," 2018.

⁵² Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Makro* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Ui, 1983),Hlm 34.